KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Provinsi Riau

Nomor Registrasi: 14-219277-2026

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK AIR PERMUKAAN (SIMAPAN)

1.2. Dibuat Oleh

Bapenda Provinsi Riau (iga2021-Bapenda.provinsi.riau)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

MUHAMMAD SAYOGA

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1. Dasar Hukum Inovasi

Dasar hukum inovasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Air Permukaan (SIMAPAN) di Provinsi Riau adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan penyelenggaraan pemungutan, administrasi, pengelolaan, dan sistem informasi pajak daerah, termasuk Pajak Air Permukaan. SIMAPAN dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai inovasi digital untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan Pajak Air Permukaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan inovasi ini mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari penguatan kemandirian keuangan daerah.

Inovasi ini juga mendukung pelaksanaan Misi Kelima Gubernur Riau, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selain itu, SIMAPAN menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pengelolaan data penerimaan pajak antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Riau Kepri, serta perangkat daerah terkait dalam mendukung sistem pembayaran pajak yang lebih efektif dan akuntabel.

2. Permasalahan

Sebelum dikembangkan SIMAPAN, pengelolaan Pajak Air Permukaan masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan proses pelayanan dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Sistem manajemen masih dilakukan secara konvensional sehingga proses administrasi, pelaporan, dan pembayaran membutuhkan waktu yang lebih lama serta belum terintegrasi secara digital.

Permasalahan lainnya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya anggaran pelaksanaan, jangkauan jaringan internet pada lokasi wajib pajak yang belum merata, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah bukan merupakan otoritas tunggal dalam pengelolaan Air Permukaan sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi lain dalam pengelolaan data perizinan dan pembayaran pajak.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian penerimaan pajak daerah, pengawasan pemungutan pajak yang belum maksimal, serta belum optimalnya peningkatan

bagi hasil pajak provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi dasar pengembangan SIMAPAN adalah kebutuhan meningkatkan kemandirian kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan yang didukung sistem digital terintegrasi.

Transformasi digital menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan proses pelayanan yang mudah, efisien, dan transparan. Integrasi data penerimaan pajak juga diperlukan agar pengawasan pemungutan pajak menjadi lebih efektif serta mampu mendukung peningkatan penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Selain itu, pengembangan SIMAPAN diarahkan untuk mendukung penerapan insentif berbasis kinerja (reward and punishment), meningkatkan sinergi dengan Bank Riau Kepri dalam pembayaran non-tunai, serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait pengelolaan data perizinan wajib pajak.

4. Metode Pembaharuan

SIMAPAN merupakan pembaharuan tata kelola pengelolaan Pajak Air Permukaan melalui digitalisasi proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Pembaharuan dilakukan dengan membangun sistem pembayaran Pajak Air Permukaan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan proses administrasi, pembayaran, dan pengawasan.

Metode pembaharuan dilakukan melalui penyusunan proses bisnis aplikasi, pengembangan aplikasi pembayaran Pajak Air Permukaan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Manual Book, pelaksanaan uji coba sistem, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Pekanbaru, serta penerapan tahap awal kepada wajib pajak Air Permukaan di Pekanbaru.

Inovasi ini juga memperkuat kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah, DPMPTSP Provinsi Riau, serta Bank Riau Kepri melalui integrasi pembayaran non-tunai berbasis Code Billing, sehingga proses pembayaran menjadi lebih praktis, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

5. Keunggulan dan Kebaruan

Keunggulan utama SIMAPAN terletak pada perubahan sistem pengelolaan Pajak Air Permukaan dari mekanisme konvensional menuju layanan berbasis digital yang terintegrasi.

Kebaruan inovasi ini meliputi:

- digitalisasi proses pengelolaan Pajak Air Permukaan mulai dari administrasi hingga pembayaran;
- integrasi dengan data perizinan melalui kerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Riau;
- pembayaran non-tunai melalui Code Billing yang terhubung dengan Bank Riau Kepri;
- penyusunan SOP dan Manual Book sebagai standar pelaksanaan;
- peningkatan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Air Permukaan melalui sistem yang lebih terdokumentasi; dan

- dukungan terhadap penerapan insentif berbasis kinerja (reward and punishment) dalam pengelolaan pajak daerah.

Melalui pembaharuan tersebut, SIMAPAN diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.

6. Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk

Implementasi SIMAPAN dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan proses bisnis aplikasi pembayaran Pajak Air Permukaan.
2. Penyusunan rancangan awal aplikasi.
3. Penyempurnaan dan penyelesaian pengembangan aplikasi.
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Manual Book sebagai pedoman penggunaan sistem.
5. Pelaksanaan uji coba aplikasi pembayaran Pajak Air Permukaan.
6. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Pekanbaru.
7. Penerapan tahap pertama kepada Wajib Pajak Air Permukaan di wilayah Pekanbaru.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi.
9. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan sistem.

SIMAPAN dirancang sebagai sistem digital yang mendukung pengelolaan Pajak Air Permukaan secara lebih mudah, efisien, terdokumentasi, serta memperkuat sinergi pengelolaan data antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPMPTSP, dan Bank Riau Kepri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Inovasi :

- Penerapan Penggunaan Aplikasi Tahap 2 (Kabupaten Kampar, Siak Sri Indrapura, Pelalawan, Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indaragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Sengingi, Meranti dan Kotamadya Dumai)
- Integrasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Riau
- Tersusunnya Penyempurnaan Rancangan Regulasi terkait Pajak Air Permukaan Penerapan Penggunaan Aplikasi Tahap 3 (Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indaragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Sengingi, Meranti)
- Integrasi dengan Inspektorat selaku APIP dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah
- Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Air Permukaan sebesar 5, 78 % atau lebih
- Pengembangan Aplikasi ke Jenis Pajak lainnya

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh :

1. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pajak
2. Sistem Manajemen yang transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi
3. Tersedianya Database yang Aktual
4. Tersedianya Data dan Laporan secara Realtime
5. Terciptanya efisiensi dan efektifitas Penggunaan Anggaran belanja
6. Meningkatnya Kepercayaan Publik
7. Terlaksananya Rekomendasi dari BPK RI dan Korsupgah KPK RI
8. Terwujudnya peningkatan penerimaan Pajak

1.13. Hasil Inovasi

Hasil Inovasi :

1. Angka Penerimaan Daerah meningkat
2. Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

16-06-2022

1.15. Waktu Implementasi

05-01-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/05/provinsi-2026-08-05-iga2021_bapenda_provinsi_riau-6f8a3a7f.pptx

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

0.4742740571872515, 101.45265558568633

1.21. Kematangan

81.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• PENETAPAN INOVASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Lebih dari 30	• SK BAPENDA • SK PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• RKPD 2024, 2025,2026 • SCREEN SHOOT KAJIAN PAP • DPA Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja secara elektronik	• media berita • CONTOH PEMBAYARAN PAP • SOSIALISASI SIMAPAN • Screen Shoot Aplikasi Air Permukaan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 1 kali bimtek (bimtek/training/TOT)	• BAHAN PRESENTASI PENGUSULAN RENCANA PERUBAHAN • SERTIFIKAT RENCANA PERUBAHAN USULAN INOVASI
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024, 2025 DAN RKPD 2026 • RENJA 2025 BAPENDA • RENCANA KERJA BAPENDA 2025 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 • Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• SK PENETAPAN INOVASI • SURAT PERMOHONAN PENETAPAN HARGA DASAR AIR

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	• INFORMASI TERKAIT PAP BAPENDA JABAR
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	• MANUAL BOOK SIMAPAN
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• SK PENETAPAN INOVASI DAN KETERLIBATAN STAKEHOLDERS • SK PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• website • instagram • hotline • SCREENSHOOT APLIKASI AIR PERMUKAAN • REVISI SOP PAJAK AIR PERMUKAAN 2025 • SOSIALISASI SI MAPAN DI MEDIA SOSIAL
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• PKS LAYANAN PEMBAYARAN PAD DAN LLPADS LAINNYA • PENGECEKAN WATER METER KE PERUSAHAAN • KUNJUNGAN SEKRETARIS KOMISI 2 DPRD PROVINSI
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN (REVISI KE TIGA)
15.	Layanan Terintegrasi	0	• screenshot tampilan SIMAPAN pada beranda website Bapenda • UNDANGAN SOFTLAUNCHING MPP • SCREEN SHOOT APLIKASI SIMAPAN
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	• PKS LAYANAN PEMBAYARAN PAD DAN LLPADS LAINNYA • PENGEMBANGAN APLIKASI SIMAPAN

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
			• RENCANA PEMBUATAN APLIKASI SIMAPAN
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• survey kepuasan masyarakat simapan • GRAFIK REALISASI PAP 2025 DAN 2026 • PENGECEKAN WATER METER
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• media berita • sosialisasi si mapan di media sosial • SOSIALISASI SI MAPAN • EVALUASI WATER METER • MONITORING WATER METER
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• PENINGKATAN PAD PAJAK AIR PERMUKAAN • Monitoring ke Perusahaan
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	-	Tidak Tersedia
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 1 (satu) periode waktu pengukuran	• REALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN 2 TAHUN • DOKUMENTASI PELAPORAN KAJIAN POTENSI PAP • LAPORAN KAJIAN POTENSI PAJAK AIR PERMUKAAN